



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD MUFTI ARKAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BALI
3. NHK : 120528

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.259.140.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/70 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 399.140.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/48 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 735.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **176.500.000**

1. MOBIL, CHEVROLET SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **394.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **245.682.493**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **611.214.751**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.687.037.244**

III. HUTANG **Rp.** **433.912.531**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.253.124.713**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.